



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Komentar (Hal. 17)

Jum'at, 14 Februari 2020

Bupati 'Ancam' Penunggak Pajak Kendis

Ratahan, KOMENTAR

Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH mengingatkan para pejabat mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke aparat pemerintahan di desa khususnya mereka yang memegang kendaraan dinas terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan. Ia memastikan akan mengambil langkah tegas bagi pejabat yang kendaraan dinasnya menunggak pajak.

Hal tersebut disampaikan Bupati ketika mendapatkan laporan beberapa kendaraan dinas belum melakukan pelunasan pajak kendaraan. "Perangkat daerah yang memegang kendaraan dinas, lalu menunggak pajak, maka saya akan mengambil tindakan tegas kepada kepala perangkat daerah itu. Ini sangat serius," ungkap Bupati, Kamis (13/02) kemarin.

Bupati kemudian memberikan batas akhir hingga kemarin untuk pelunasan pajak kendaraan dinas bagi

mereka yang menunggak pembayaran pajak itu sendiri. "Harusnya para pejabat tahu dan sadar bahwa pajak untuk membayar kendaraan dinas itu dananya diambil dari keuangan daerah, bukan dari kantong pribadi pejabat," sebutnya.

"Oleh karena itu, maka tunggakan pajak kendaraan dinas adalah sebuah pelanggaran yang serius. Maka dari itu, saya memberikan kesempatan hingga hari ini (kemarin, red) bagi yang merasa belum melunasi pajak kendaraan dinas



Sebagian kendaraan dinas Pemkab Mitra termasuk beberapa Molnas. Para pemegangnya wajib memperhatikan pembayaran pajak. Inzet: James Sumendap.

untuk segera melunasinya karena sanksi tegas akan diberikan," imbuhnya.

Bupati menyampaikan, hanya ada tiga sanksi yang menunggu para pejabat kumabal tersebut, yakni diberhentikan dari jabatannya alias 'disekolahkan', atau bisa pula diturunkan

eselonnya, atau bisa pula pak Wakil Bupati segera dimutasikan. "Saya minta menginventarisasi perang-

kat daerah mana yang ternyata masih menunggak pajak kendaraan dinas, dan segera dilaporkan," tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menggelar rapat membahas rencana punishment bila ada kepala perangkat daerah yang memang sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tetap menunggak pajak kendaraan bermotor. "Saya tunggu laporannya," pungkasnya.

